DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
SEKETARIAT DPRD KOTA MADIUN TAHUN 2020

NO	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
			PENGECUALIAN	AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	**Seketariat DPRD Kota Madiun**	• PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Pasal 2 ayat 2	• Selama masih berlaku	• Mengganggu kepentingan perlindungan hak	• Menyediakan data lengkap yang dilindungi dalam proses penengakan hukum
2	**Arsip dinamis, aktif dan inaktif,yang berisikan :** **a. Dokumen keuangan:** • **SPJ berikut lampirannya dokumen anggaran dan otoritasnya** • **Surat pencairan anggaran** **b. Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat** **c. Memorandum/surat-surat penting yang perlu dirahasiakan**	• UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) • UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2)	• Selama masih berlaku • Selama masih berlangsungnya penyelenggaraannya • Selama Status perlindungan masih berlaku	• Menghambat proses penengakan hukum • Menganggu kepentingan perlindungan hak • Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan	• Menyediakan data lengkap yang dilindungi dalam proses penengakan hukum • Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi • Melancarkan proses kegiatan
3	**Permintaan data by name by address Anggota DPRD dan PNS**	• UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 8 ayat (1) huruf e • UU No.24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat 22	• Selama masih berlaku	• Mengganggu kepentingan perlindungan	• Menyediakan data lengkap yang dilindungi proses penegakan hukum

NO	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
			PENGECUALIAN	AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
4	**Data pribadi penduduk (No KK, NIK) DPRD dan PNS**	• UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Pasal 17 huruf i • UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 ayat (1) dan (2), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3)	• Sampai terbitnya keputusan Mendagri/Gubernur/ Bupati/Wali Kota tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk	• Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	• Melindungi rahasia pribadi seseorang
5	**Daftar Nilai SKP PNS**	• UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Pasal 17 huruf i	• selama masih berlaku	• Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	• Melindungi data pribadi seorang PNS yang bersifat rahasia
6	**LHKPN**	• Peraturan KPK No.7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)	• Sampai dengan ada persetujuan dari Anggota DPRD yang dijatuhi hukuman .	• Dapat mengungkap rahasia kekayaan pribadi seorang Anggota DPRD – dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	• Melindungi rahasia pribadi seorang Anggota DPRD • Mengamankan proses penyusunan kebijakan
7	**Dokumen penyelesaian sengketa**	• UU no.14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Pasal 17 huruf a	• Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa)	• Dapat menghambat proses penegakan hukum	• Membantu kelancaran proses penengakan hukum

NO	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
			PENGECUALIAN	AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
8	**Laporan Keuangan (laporan keuangan yang belum diaudit)**	• UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 ayat (1)	• Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	• Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	• Membantu mencapai keberhasilan pelaksana pembangunan
9	**Disposisi surat pimpinan**	• UU No.14 tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Pasal 17 huruf i	• Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengelola surat	• Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	• Mengamankan proses penyusunan kebijakan

Madiun, 31 Januari 2020
Atasan Ketua PPID Pembantu
Sekretaris DPRD Kota Madiun

PEMERINTAH KOTA MADIUN
SEKRETARIAT DPRD

Drs. MISDI. M.Si
Pembina
NIP. 1969010119921 002